

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KOTA BANJARBARU**

LAPORAN TAHUNAN 2024

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. DASAR HUKUM	1
	B. GAMBARAN UMUM SKPD.....	3
BAB II	RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD.....	10
	A. VISI DAN MISI SKPD	10
	B. TUJUAN DAN SASARAN	10
	C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD.....	11
	D. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	14
BAB III	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	25
	A. URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT	25
	B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	31
	C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	40
	D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	42
BAB IV	TUGAS PEMBANTUAN	48
	A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.....	48
	B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.....	48
BAB V	PENUTUP.....	49

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia Nya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan laporan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada tahun 2024, yang berfungsi sebagai laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Banjarbaru, 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru,

ASEP SAPUTRA, S.Kom, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19770909 200604 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru sebagai salah satu SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan misi keempat pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatnya kualitas layanan informasi publik dengan teknologi dan informasi”. Sesuai Dengan Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 84 menyebutkan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Informatika dan Bidang Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Saat ini perkembangan dunia terkait dengan komunikasi dan informatika atau lebih familiar orang menyebut dunia TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga aktivitas pemerintah dalam siklus birokrasi dan pelayanan publik pun harus menyesuaikan yang disebut dengan *electronic government*. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis *e-government* sebenarnya telah didorong pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, yang mengamanatkan setiap Bupati / Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan

tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional. Pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e-government) diharapkan dapat mendukung tugas fungsi Pemerintahan kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah (Government to Citizen, Government to Business, Government to Employee, Government to Government).

Dasar hukum menjadi acuan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru NOMOR 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota

Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

B. Gambaran Umum SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 67 tahun 2021 menyebutkan, Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas pokok, yaitu :

- **Tugas Pokok :**

Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Informatika dan Bidang Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

- **Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang komunikasi dan informasi publik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang informatika;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian ;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informasi publik serta Informatika;
- e. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informasi publik serta informatika;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Komunikasi membawahi :
 - 1. Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik
 - 2. Seksi Pelayanan Informasi
- d. Bidang Informatika membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data
 - 2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Website Pemerintahan
- e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi :
 - 1. Seksi Statistik
 - 2. Seksi Persandian
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

3. Keadaan Pegawai

No	Nama	Pangkat/ Gol	Jabatan	Pendidikan
1	Asep Saputra, S.Kom, MM	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas	S-2
2	M. Agus Adrian, AP, M. Si	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	S-2
3	Najmah Sri Agustinah, S.Sos	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S-1
4	Helfizah Ristiaty, SE	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S-1
5	Widyarti, SE	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	S-1
6	Naryati, A.Md	Penata (III/c)	Pengelola Bahan Perencanaan	D-3
7	Faslia, SE	Penata	Penelaah Teknis	S-1

		(III/c)	Kebijakan	
8	Wiwiek Pangestu Rahayu	Penata Muda (III/a)	Verifikator Keuangan	SMA
9	Fatimah	Pengatur Tk.I (III/a)	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	SMU
10	Naomi	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	SMK
11	Ashari Murti	Pengatur Tk. I (II/d)	Pramu Bakti	SMA
12	Muryani, A. Md	-	Prakom Terampil	D-3
13	Nourma Firtiani, A. Md	-	Prakom Terampil	D-3
14	Dewi Sartika Fauzi, ST	-	Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan	S-1
15	Marshenda Nur Ariyanti, SM	-	Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan	S-1
16	Cempaka Sekar Sari, S. Ak	-	Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan	S-1
17	Linda Rahmasari	-	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	SMK
18	Dicky Kharisma Dewa	-	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	SMA
Bidang Komunikasi dan Informasi				
1	Herry Isdaryoko, S.AP., MA	Pembina (IV/a)	Kabid Komunikasi dan Informasi Publik	S-2
2	Fada Betha Maharani, SH	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pelayanan Informasi	S-1

3	Denni Herriadi, S. Kom	Penata (III/c)	Kasi Komunikasi dan KIP	S-1
4	Titiek Septiningsih, S. Kom	Penata (III/c)	Pranata Komputer Ahli Muda	S-1
5	Muhammad Fajar Rizwanna, S.Kom	Penata (III/c)	Analisis Publikasi	S-1
6	Tedy Yusuf Priatna, A.Md	Penata Muda Tk.I (III/b)	Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi	D-3
7	Muhammad Irza Haifany, S. I. Kom	Penata Muda (III/a)	Analisis Berita	S-1
8	Nazuarni	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengelola Dokumentasi	MA
9	Muhammad Rizky DR, S. Ds	-	Staf Seksi Komunikasi dan KIP	S-1
10	Mecca Maulivia Azza, S. Kom	-	Staf Seksi Pelayanan Informasi	S-1
11	Ahmadi	-	Staf Seksi Komunikasi dan KIP	SMA
12	Novia Rahmi F, S. AP	-	Staf Seksi Komunikasi dan KIP	S-1
13	Yudhistira Surya	-	Staf Seksi Komunikasi dan KIP	SMA
14	Septi Puspita Anggraini, S. Kom	-	Staf Seksi Komunikasi dan KIP	S-1
15	Akhmad Rizqi Azhari, S. Kom	-	Staf Seksi Komunikasi dan	S-1

			KIP	
16	Putri Sunita	-	Staf Seksi Pelayanan Informasi	SMK
17	Aldie Chairul Saleh, S. Kom	-	Staf Seksi Komunikasi dan KIP	S-1
18	Muhammad Hafiz, S.I. Kom	-	Staf Seksi Komunikasi dan KIP	S-1
19	Muhammad Ade Saputra	-	Staf Seksi Komunikasi dan KIP	SMK
20	Nurin Aulia, S. I. Kom	-	Staf Seksi Komunikasi dan KIP	S-1
Bidang Informatika				
1	Khairurrijaal, S. STP	Pembina (IV/a)	Kabid Informatika	D-IV
2	Teddy Endar Sukmana, ST	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pengelola Jaringan Komunikasi Data	S-1
3	Wijaya Kesuma, S. Kom	Penata (III/d)	Kasi Pengembangan SI dan Website Pemerintah	S-1
4	Reza Muttaqien, S. Kom	Penata Tk.I (III/d)	Pranata Komputer Ahli Muda	S-1
5	Husnul Khatimah, S. Kom	Penata Tk.I (III/d)	Pranata Komputer Ahli Muda	S-1
6	Nor Amalia, S. Kom	Penata (III/c)	Pranata Komputer Penyelia	S-1

7	Nor Azizah, S. Kom	-	Staf Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data	S-1
8	M.Ridha Rahimi, S. Kom	-	Staf Seksi Pengembangan SI dan Website Pemerintah	S-1
9	Djaka Umbara Wurung, S. Kom	-	Staf Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data	S-1
10	M. Ginanjar, S. Kom	-	Staf Seksi Pengembangan SI dan Website Pemerintah	S-1
11	Canda Sukma Riski Yanti, S. Kom	-	Staf Seksi Pengembangan SI dan Website Pemerintah	S-1
12	Achmad Maulana, S. Kom	-	Staf Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data	S-1
13	Reski Juniadi Iswar	-	Staf Seksi Pengembangan SI dan Website Pemerintah	SMA
14	Muhammad Hevny Rizky	-	Staf Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data	S-1
15	Muhammad Rizky Ananda	-	Staf Seksi Pengembangan SI dan Website Pemerintah	SMA
16	Handy Rozaku Putranto, S. Kom	-	Staf Seksi Pengembangan SI	S-1

			dan Website Pemerintah	
17	Ahmad Faisal, S. Pd	-	Staf Seksi Pengembangan SI dan Website Pemerintah	S-1
18	M. Rizki Akbar, S. Kom	-	Staf Seksi Pengembangan SI dan Website Pemerintah	S-1
Bidang Statistik dan Persandian				
1	Drs. Krisman	Pembina (IV/a)	Kabid Statistik dan Persandian	S-1
2	Syahirati Fibri Andina, S. Kom	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Persandian	S-1
3	Erlina Apriyanti, S. Si	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Statistik	S-1
4	Theresia Rieka Budiarti, S. Kom	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Persandian	S-1
5	Amin Rawa, A. Md	-	Statistisi Terampil	D-3
6	M. Haris Irwansyah, S. Kom	-	Staf Seksi Statistik	S-1
7	Ahmad Ridho Setiawan, S. Kom	-	Staf Seksi Statistik	S-1
8	Haidar Ahmad Ma'rif, S. Kom	-	Staf Seksi Persandian	S-1
9	Alif Firdaus	-	Staf Seksi Persandian	SMK

BAB II

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD

A. Visi dan Misi SKPD

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG MENGGUNAKAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG HARAT (HANDAL, AMAN, RESPONSIF DAN TERINTEGRASI)”.

Penjelasan dari Visi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- Terwujudnya pelayanan publik yang menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) adalah terciptanya pelayanan publik di Kota Banjarbaru berbasis elektronik menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi sehingga memudahkan masyarakat.
- TIK yang Harat (handal, aman, responsif dan terintegrasi) adalah teknologi yang digunakan adalah handal yang kekinian, aman sesuai standar yang ditetapkan, responsif terhadap perkembangan jaman dan terintegrasi (terhubung antara SKPD satu dengan yang lain) sehingga jadi efektif dan efisien.

MISI SKPD

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas layanan publik
- 2) Meningkatnya informasi publik
- 3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral
- 4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi

B. Tujuan dan Sasaran

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

- Tujuan : Meningkatnya kualitas layanan informasi publik dengan teknologi informasi dan komunikasi

- ✚ Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas layanan publik
 2. Meningkatnya informasi publik
 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral
 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi

C. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran, diperlukan langkah-langkah strategi dan kebijakan SKPD, adapun stategi dan kebijakan SKPD yaitu :

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
			Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

			Kabupaten / Kota
			Meningkatkan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
			Meningkatkan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas
			Melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2.	Meningkatnya informasi publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Melaksanakan Monitoring opini dan aspirasi publik
			Meningkatkan pengelolaan media komunikasi publik

			Meningkatkan layanan hubungan media
			Melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
			Meningkatkan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas
			Meningkatkan pelayanan informasi publik
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral
			Membangun Metadata Statistik Sektoral
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

D. Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru sesuai dengan pendanaan indikatif, maka ditetapkan kegiatan untuk belanja urusan wajib sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Capaian program : Nilai Aspek SPBE

- Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Output : Persentase SKPD yang memperbaharui data dan informasi ke dalam domain dan sub domain.

Outcome : Peningkatan penggunaan domain dan sub domain.

1.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Output : Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten / Kota

Outcome : Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten / Kota

1.2 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Output : Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Outcome : Terlaksananya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

- Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Output : Persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan e – government.

Outcome : Pelaksanaan Pengelolaan e-government di Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Output : Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan
Pengawasan e-government dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota

Outcome : Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan
e-government dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1.2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Output : Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang
Terkelola

Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Pusat Data
Pemerintahan Daerah

1.3 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Output : Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang Dikembangkan

Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Aplikasi dan Proses
Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
Dikembangkan

1.4 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota
Cerdas dan Kota Cerdas

Output : Jumlah Dokumen Program Inovasi yang
Diimplementasikan Sesuai dengan *Masterplan
Smart City*

Outcome : Terlaksananya Program Inovasi yang
Diimplementasikan Sesuai dengan *Masterplan
Smart City*

1.5 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Output : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Outcome : Terlaksananya Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

2) PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Capaian program : Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah

➤ Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Output : Persentase layanan informasi publik yang dikelola dengan baik. Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti unit kerja jumlah pengaduan masyarakat.

Outcome : Peningkatan pengelolaan layanan informasi publik dan peningkatan jumlah laporan masyarakat.

2.1 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Output : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Outcome : Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

2.2 Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Outcome : Terlaksananya Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

2.3 Pelayanan Informasi Publik

Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik

Outcome : Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik

2.4 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Output : Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya

Outcome : Terpenuhinya penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik

2.5 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Output : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan

Outcome : Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas yang Terdiseminasi

2.6 Layanan Hubungan Media

Output : Jumlah Layanan Hubungan Media

Outcome : Cakupan Layanan Hubungan Kerjasama dengan Media

3) PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Capaian program : Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah

➤ Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah Kabupaten/ Kota

Output : Persentase Data Statistik Sektoral yang Terupdate dan Terverifikasi

Outcome : Penyediaan data statistik sektoral daerah

3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Sektoral

Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

3.2 Membangun Metadata Statistik Sektoral

Output : Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun

Outcome : Terlaksananya Metadata Statistik Sektoral

4) PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Capaian program : Prosentase Tingkat Pengamanan Informasi Pemerintah

➤ Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Output : Persentase SKPD yang Menerima Layanan Keamanan Informasi

Outcome : Peningkatan Layanan Keamanan Informasi

4.1 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Output : Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi

Outcome : Terlaksananya perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi

Sedangkan untuk belanja langsung Non Urusan, maka ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian program : Prediksi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

➤ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output : Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD

Outcome : Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD yang Tersusun sesuai Ketentuan dan Jumlah Dokumen Perencanaan yang Menggunakan Analisis Gender

Outcome : Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan SKPD

1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun sesuai Ketentuan

Outcome : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

➤ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Output : Persentase Laporan Keuangan yang Disusun sesuai Ketentuan

Outcome : Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD

1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output : Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

Outcome : Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN

1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Output : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan

Outcome : Terlaksananya monitoring capaian kinerja keuangan SKPD

1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun di sesuai ketentuan

Outcome : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan tahunan

➤ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Output : Persentase laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun sesuai ketentuan

Outcome : Peningkatan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

1.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Output : Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun.

Outcome : Terlaksananya peningkatan tata kelola administrasi barang pada SKPD

➤ Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output : Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi

Outcome : Peningkatan pengelolaan administrasi Umum SKPD

1.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Outcome : Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan

1.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Output : Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang disediakan

Outcome : Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor

1.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Output : Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan

Outcome : Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetak

1.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan

Outcome : Terlaksananya penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Outcome : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

➤ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Output : Cakupan penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi

Outcome : Peningkatan fasilitas penggunaan jasa pihak ketiga

1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Outcome : Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Outcome : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

➤ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Output : Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik

Outcome : Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Outcome : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya

Outcome : Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

1.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Outcome : Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

1.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi

Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.5 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi

Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

➤ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Output : Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan

Outcome : Peningkatan penyediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Outcome : Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Outcome : Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Urusan Pemerintahan Sekretariat

1. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Tingkat Capaian

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan pemerintahan sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran 83,96%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi anggaran 99,29%
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi anggaran 96,04%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD realisasi anggaran 74,66%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD realisasi anggaran 97,23%
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD realisasi anggaran 92,62%

- 4) Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi anggaran 88,88%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor realisasi anggaran 88,79%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan realisasi anggaran 100%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi anggaran 84,07%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi anggaran 100,00%
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi anggaran 91,95%
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya realisasi anggaran 97,40%
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi anggaran 96,65%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi anggaran 89,12%
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi anggaran 57,29%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi anggaran 94,11%
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi anggaran 91,75%

- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi anggaran 99,31%
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya realisasi anggaran 99,86%

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

PROGRAM/SUB KEGIATAN	Anggaran			Persentase (%)	
	Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,388,157,790	6,120,745,287	267,412,503	91,15	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,191,350	15,273,928	2,917,422	83,96	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	233,614,600	231,953,460	1,661,140	99,29	100.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,213,888,820	4,047,114,664	166,774,156	96,04	100.00
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhrit Tahun SKPD	8,515,800	6,358,200	2,157,600	74,66	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	22,145,450	21,531,800	613,650	97,23	100.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14,999,800	13,892,950	1,106,850	92,62	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,008,500	20,449,000	2,559,500	88,88	100.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120,513,000	107,003,600	13,509,400	88,79	100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,190,400	36,190,300	100	100	100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,157,000	2,654,000	503,000	84,07	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	391,969,000	391,969,000	-	100,00	100.00

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116,884,200	107,480,089	9,404,111	91,95	100.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,667,000	49,350,000	1,317,000	97,40	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242,400,000	234,291,240	8,108,760	96,65	100.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248,294,000	221,279,026	27,014,974	89,12	100.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37,993,150	21,765,600	16,227,550	57,29	100.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142,435,500	134,042,900	8,392,600	94,11	100.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,950,000	27,480,000	2,470,000	91.75	100.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	373,375,000	370,785,500	2,589,500	99,31	100.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59,965,220	59,880,030	85,190	99,86	100.00

B. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

1. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Program Aplikasi Informatika

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

b. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

1. Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunikasi
- Layanan Hubungan Media

2. Tingkat Capaian

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru , yaitu :

a. Program Aplikasi Informatika

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan realisasi anggaran 94,53%
 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran 91,22%
2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan realisasi anggaran 73,62%
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan realisasi anggaran 89,58%
 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan realisasi anggaran 62,76%
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran 58,70%
 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran 98,43%

b. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

1. Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan realisasi anggaran 98,70%
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan realisasi anggaran 94,99%
 - Pelayanan Informasi Publik dengan realisasi anggaran 80,23%
 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dengan realisasi anggaran 97,16%
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan realisasi anggaran 97,55%
 - Layanan Hubungan Media dengan realisasi anggaran 97,06%

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

PROGRAM/SUB KEGIATAN	Anggaran			Persentase (%)	
	Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6,491,944,020	6,190,552,134	301,391,886	81,26	100
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	84,998,550	80,346,325	4,652,225	94,53	100.00
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1,524,887,270	1,390,987,650	133,899,620	91,22	100.00
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35,570,100	26,187,950	9,382,150	73,62	100.00
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	4,420,034,200	4,350,503,659	69,530,541	98,43	100.00
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	290,222,200	259,972,400	30,249,800	89,58	100.00
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	63,801,900	40,040,550	23,761,350	62,76	100.00
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	72,429,800	42,513,600	29,916,200	58,70	100.00

PROGRAM/SUB KEGIATAN	Anggaran			Persentase (%)	
	Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3,319,277,950	3,211,930,957	107,346,993	94,28	100.00
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	53,321,700	52,629,150	692,550	98,70	100.00
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	275,808,900	261,992,790	13,816,110	94,99	100.00
Pelayanan Informasi Publik	44,079,000	35,363,600	8,715,400	80,23	100.00
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	150,654,850	146,375,575	4,279,275	97,16	100.00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	474,308,200	462,682,042	11,626,158	97,55	100.00
Layanan Hubungan Media	2,321,105,300	2,252,887,800	68,217,500	97.06	100.00

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik yaitu :
 - a. Terlaksananya kerjasama dengan media cetak, elektronik dan online
 - b. Terlaksananya pembentukan KIM
 - c. Terfasilitasinya Tim Lapor
5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sudah cukup.
6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang menjadi kendala serta solusi pada bidang komunikasi dan informasi publik, yaitu :

a) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

1) Permasalahan

- ✓ Keterbatasan SDM, menyebabkan kegiatan pengumpulan dan analisis informasi hanya dilakukan melalui beberapa media yaitu media cetak media daring. Itupun hanya pada media yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota dan dilaksanakan oleh SDM dari Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi. Belum dilakukan analisis terhadap media social, radio, dan televisi sesuai Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019.
- ✓ Belum dilaksanakan pengumpulan pendapat umum (belum pernah ada polling ke masyarakat berdasarkan isu strategis).
- ✓ Pemantauan aduan masyarakat baru dilaksanakan melalui aplikasi SP4N-LAPOR, sementara pada unit-unit kerja terdapat kanal-kanal pengaduan yang lain. Hal ini membuat analisa dan rekomendasi yang dibuat kurang akurat.
- ✓ Aplikasi SP4N-LAPOR belum tersosialisasi dengan baik sehingga partisipasi masyarakat masih kurang.

2) Solusi

- ✓ Penambahan SDM yang khusus memantau isu publik di media massa dan media sosial.
- ✓ Membuat polling sesuai isu strategis dari pimpinan.
- ✓ Aduan yang diterima melalui kanal lain selain LAPOR! dapat diinputkan oleh admin di unit kerja ke aplikasi LAPOR!.
- ✓ Memanfaatkan kanal-kanal publikasi yang dimiliki untuk sosialisasi penggunaan aplikasi LAPOR!, kolaborasi dengan bidang / SKPD lain dalam mensosialisasikan aplikasi LAPOR!, penambahan anggaran untuk sosialisasi secara langsung.

b) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

1) Permasalahan

Kurangnya perangkat pendukung dalam pengolahan media konten baik untuk photography atau videography oleh tim multimedia.

2) Solusi

Perlu diusulkan perencanaan anggaran belanja modal terkait perangkat pendukung pengolahan konten di tahun berikutnya.

c) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

1) Permasalahan

✓ PPID kurang memahami Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunannya, dampaknya Pengolahan informasi tidak sesuai dengan regulasi, seperti tidak diumumkannya informasi berkala dan serta merta, permintaan informasi belum dilaksanakan sesuai ketentuan.

✓ Keterbatasan anggaran, menyebabkan pelatihan tentang prinsip-prinsip keterbukaan informasi hanya dilaksanakan untuk admin SIP-PPID, sementara untuk PPID Pelaksana belum dapat diselenggarakan sehingga control terhadap ketersediaan informasi sesuai peraturan masih rendah.

✓ Pemahaman terhadap konsep keterbukaan informasi belum merata.

2) Solusi

✓ Monitoring dan evaluasi secara berkala dan terstruktur.

✓ Penambahan anggaran untuk Bimtek dengan narasumber yang kompeten

✓ Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada admin dan PPID Pelaksana.

d) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

1) Permasalahan

Kurangnya komitmen pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam konsistensi penyebaran informasi publik yang dikelola.

2) Solusi

Melakukan penguatan SDM anggota KIM melalui pelatihan dan pertemuan / sarasehan secara rutin.

e) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media

1) Permasalahan

Belum adanya analisis jumlah sebaran publikasi dan isu publik yang terkelola media pers yang bekerjasama di Dinas Komunikasi dan Informatika.

2) Solusi

Perlu perangkat lunak atau sejenisnya yang mendukung analisis media perbulannya.

7. Hal-Hal Lain Yang Dianggap Perlu

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Informatika, yaitu :
 - a. Terpasangnya infrastruktur jaringan fiber optik dan perangkat pendukung yang menghubungkan 20 (dua puluh) SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru
 - b. Tersusunnya Master Plan TIK Kota Banjarbaru sebagai acuan pengembangan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Banjarbaru minimal 5 (lima) tahun ke depan.
5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan pada Bidang Informatika sudah baik.
6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang menjadi kendala serta solusi pada bidang informatika, yaitu :

- a) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1) Permasalahan

- Kondisi server website resmi SKPD yang terletak pada Pusat Data Nasional Sementara masih belum diakses sehingga ada beberapa website SKPD yang masih dalam kondisi tidak aktif. Dan kordinasi dengan pihak pengelola PDNS masih belum selesai untuk mendapatkan akses ke dalam server milik pemerintah Kota Banjarbaru yang terletak di PDNS.
- Kondisi infrastruktur Pusat Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru yang terbatas sehingga untuk merecovery seluruh website resmi SKPD pada server yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tidak memungkinkan
- Adanya pergantian admin website resmi SKPD dengan admin yang baru yang akhirnya menghambat pengelolaan website resmi SKPD

2) Solusi

- Melanjutkan koordinasi dengan pihak pengelola PDNS untuk mendapatkan akses ke server website SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru yang terletak pada PDNS
- Meningkatkan kapasitas server lokal yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
- Melakukan pelatihan kepada admin website SKPD yang baru

- b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

- Kualitas Perangkat Jaringan yang Tidak Memadai

- 1) Permasalahan

- Perangkat seperti router dan switch tidak mampu menangani beban trafik yang tinggi. Minimnya fitur redundansi meningkatkan risiko kegagalan layanan

- 2) Solusi

- Mengganti perangkat dengan spesifikasi terkini yang mendukung teknologi modern seperti SDN (Software-Defined Networking)
 - Menambahkan fitur failover untuk menjaga layanan tetap berjalan meski terjadi kegagalan perangkat
 - Melakukan inventarisasi dan audit perangkat secara berkala

- Keterbatasan Bandwidth dan Pengelolaan QoS (Quality of Service)

- 1) Permasalahan

- Gangguan pada aplikasi vital akibat trafik yang tidak terkelola
 - Lambatnya akses data antar instansi

- 2) Solusi

- Meningkatkan Bandwidth dengan kerjasama bersama penyedia layanan terpercaya
 - Mengimplementasikan QoS untuk memastikan aplikasi prioritas mendapatkan alokasi bandwidth yang cukup
 - Menggunakan perangkat monitoring trafik untuk mengidentifikasi penggunaan bandwidth yang tidak efisien

- Manajemen Jaringan yang Tidak Terintegrasi

- 1) Permasalahan

- Sulit mendeteksi dan menyelesaikan masalah jaringan secara cepat
 - Jaringan tidak berjalan optimal karena kurangnya integrasi perangkat

- 2) Solusi

- Mengadopsi platform monitoring terpusat seperti NOC (Network Operations Center)
 - Mengintegrasikan semua perangkat dengan protokol standar seperti SNMP dan Netflow
 - Menetapkan system alert otomatis berbasis AI untuk deteksi dini anomali jaringan

- Kurangnya SDM yang Terampil di Bidang Teknologi Jaringan

- 1) Permasalahan

- Masalah teknis sulit diselesaikan dengan cepat

- Penerapan teknologi baru menjadi lambat
- 2) Solusi
 - Mengadakan pelatihan rutin untuk teknisi terkait teknologi seperti SDN, SD-WAN dan keamanan jaringan
 - Menjalin kerjasama dengan lembaga Pendidikan atau penyedia teknologi untuk meningkatkan kapasitas SDM
 - Mengadopsi program knowledge sharing antar instansi untuk memperluas keahlian teknisi
- c) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - 1) Permasalahan

Belum adanya arsitektur SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE sebagai acuan pengembangan SPBE Kota Banjarbaru.
 - 2) Solusi

Menyusun Dokumen Arsitektur SPBE yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE dan menyusun Dokumen Peta Rencana SPBE sebagai acuan pengembangan SPBE Kota Banjarbaru
- d) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 1) Permasalahan

Belum adanya Dokumen Manajemen SPBE sebagai acuan pedoman tatakelola SPBE Kota Banjarbaru
 - 2) Solusi

Menyusun Dokumen Manajemen SPBE sebagai pedoman acuan tatakelola SPBE Kota Banjarbaru
- e) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - 1) Permasalahan

Belum diperbaharui atau disusun kembali masterplan Smartcity Kota Banjarbaru sebagai acuan pelaksanaan pengembangan Smartcity Kota Banjarbaru
 - 2) Solusi

Menyusun Dokumen masterplan Smartcity dengan menyesuaikan RPJMD yang terbaru pelaksanaan pengembangan Smartcity Kota Banjarbaru

- f) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- 1) Permasalahan
Teknologi informasi yang berkembang pesat memerlukan peningkatan kompetensi SDM TIK yang ada.
 - 2) Solusi
Meningkatkan Kompetensi SDM TIK dengan melakukan bimbingan teknis dan mengikuti workshop yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi Digital RI
- g) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- 1) Permasalahan
Keamanan Jaringan yang Rentan
 - Risiko serangan siber seperti ransomware dan DDoS meningkat
 - Data sensitif rentan terhadap pencurian atau manipulasi
 - 2) Solusi
 - Mengadopsi Next-Generation Firewall (NGFW) untuk perlindungan yang lebih baik
 - Menggunakan sistem IPS / IDS untuk mendeteksi dan mencegah ancaman siber secara real-time
 - Menerapkan enkripsi standar seperti IPsec atau LS untuk semua komunikasi jaringan
 - Melakukan simulasi serangan (penetration testing) secara rutin untuk mengidentifikasi kelemahan

7. Hal-Hal Lain Yang Dianggap Perlu

C. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

1. Program dan Kegiatan

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- 1) Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Tingkat Capaian

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru , yaitu :

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- 1) Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota
 - Penyediaan Layanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran 95,27%

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

PROGRAM/SUB KEGIATAN	Anggaran			Persentase (%)	
	Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	195,759,700	186,497,900	9,261,800	95,27	100.00
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	195,759,700	186,497,900	9,261,800	95,27	100.00

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Statistik dan Persandian, yaitu :

- a. Terlaksananya pembuatan Buku statistik Kota Banjarbaru
- b. Terlaksananya pembuatan Booklet selang pandang Kota Banjarbaru
- c. Terlaksananya pembuatan Leaflet Kota Banjarbaru
- d. Terlaksananya pembuatan CD profil Kota Banjarbaru
- e. Terlaksananya pembuatan buku indikator makro

5. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang menjadi kendala serta solusi pada bidang statistik dan persandian, yaitu :

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

1) Permasalahan

- ✓ Kualitas data masih rendah
 - Data-data yang dihasilkan oleh produsen data / SKPD belum terstandarisasi
 - Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di Bidang Statistik dan Teknologi Informasi
 - Ketidakselarasan kebijakan antar sektoral
 - Masalah validitas keakuratan data
 - Keterbatasan anggaran

2) Solusi

- ✓ Meningkatkan koordinasi dengan para pengelola data sektoral SKPD SKPD
- ✓ Bimbingan teknis bagi operator / pengelola data
- ✓ Penyusunan standar dan pedoman Nasional untuk statistik sektoral
- ✓ Penetapan standar pengumpulan data yang ketat dan pelatihan bagi pengumpul / pengolah data

b) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

1) Permasalahan

- ✓ Kualitas data masih rendah
 - Data-data yang dihasilkan oleh produsen data / SKPD belum terstandarisasi
 - Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di Bidang

Statistik dan Teknologi Informasi

- Ketidakselarasan kebijakan antar sektoral
- Masalah validitas keakuratan data
- Keterbatasan anggaran

2) Solusi

- ✓ Pembinaan statistik sektoral terhadap produsen data / SKPD
- ✓ Bimbingan teknis bagi operator / pengelola data
- ✓ Pemanfaatan anggaran yang ada secara optimal, kolaborasi antar instansi dalam melaksanakan kegiatan statistik

c) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Permasalahan

- ✓ Serapan anggaran Tahun 2024 tidak digunakan secara maksimal dikarenakan terdapat proses negosiasi dalam penawaran pembelian barang / jasa di ekatalog.
- ✓ Kurang optimalnya pelaksanaan penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
- ✓ Proses penanganan dan pemulihan insiden siber pada sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru terkendala dikarenakan kondisi server sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang terletak pada Pusat Data Nasional sementara masih belum diakses sehingga ada beberapa sistem elektronik yang masih dalam kondisi tidak aktif. Koordinasi dengan pihak pengelola PDNS masih belum selesai untuk mendapatkan akses ke dalam server milik pemerintah Kota Banjarbaru yang terletak di PDNS

2) Solusi

- ✓ Mengupayakan untuk serapan anggaran di tahun berikutnya lebih maksimal
- ✓ Melakukan pendampingan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk fasilitasi pemanfaatan tanda tangan elektronik perlu dilakukan secara berkesinambungan dan secara berkala dan membuatkan group komunikasi untuk SKPD agar dapat melakukan koordinasi lebih mudah serta melakukan evaluasi dan monitoring melalui FGD atau bimbingan teknis terkait Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

- ✓ Berkoordinasi secara berkesinambungan dengan pihak pengelola PNDNS untuk mendapatkan akses ke server sistem elektronik Pemerintah Kota Banjarbaru yang terletak pada PDNS
- ✓ Meningkatkan kapasitas server lokal yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
- ✓ Meningkatkan Kompetensi SDM Cyber Security dan TIK dengan melakukan bimbingan teknis dan mengikuti workshop yang diadakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta instansi yang berwenang.

7. Hal-Hal Lain Yang Dianggap Perlu

D. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1. Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- 1) Penyelenggaraan Statistik sektoral daerah Kabupaten / Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data sektoral
 - Membangun Metadata Statistik Sektoral

2. Tingkat Capaian

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru , yaitu :

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- 1) Penyelenggaraan Statistik sektoral daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data sektoral dengan realisasi 98,24%
 - Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan realisasi 98,43%

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

PROGRAM/SUB KEGIATAN	Anggaran			Persentase (%)	
	Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	190,185,950	186,953,275	3,232,675	98.33	100.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	128,388,650	126,129,175	2,259,475	98.24	100.00
Membangun Metadata Statistik Sektoral	61,797,300	60,824,100	973,200	99.43	100.00

2) Indikator Kinerja Kunci

a. Tataran Pengambil Kebijakan

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan tersebut untuk SKPD, dibuktikan dengan data dukung terlegalisasi atas isian IKK yang disajikan. (format isian IKK terlampir)

b. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum.

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan tersebut untuk SKPD, dibuktikan dengan data dukung terlegalisasi atas isian IKK yang disajikan. (format isian IKK terlampir)

c. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan.

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan wajib dan pilihan dibuktikan dengan data dukung terlegalisasi atas isian IKK yang disajikan. (format isian IKK terlampir)

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

(Tidak ada Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru)

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Program dan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
8. Permasalahan dan Solusi
9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

(Tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru)

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada Kepala Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

BAB V

PENUTUP

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam melaksanakan operasional kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, serta menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta peran operasionalnya melaksanakan pembangunan secara fisik, berupa infrastruktur TIK dan membangun sikap mental masyarakat yang mengarah pada terciptanya sikap partisipatif aktif, kesadaran dan positif dalam menyikapi pelaksanaan pembangunan, serta terciptanya kondisi masyarakat yang semakin meningkat kualitas hidupnya dan menjadi SDM yang produktif.

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tahun 2024 secara umum untuk penyerapan anggaran sebesar **95,85%** (sembilan puluh lima koma delapan puluh lima persen) sedangkan capaian fisik sebesar 100% (seratus persen). Adapun kegiatan yang serapan anggarannya terkecil adalah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar **57,29%** (lima puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen). Sedangkan kegiatan lainnya yang serapan anggarannya di bawah 75% (tujuh puluh lima persen) yaitu sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar **74,66%** (tujuh puluh empat koma enam puluh enam persen), sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota sebesar **73,62%** (tujuh puluh tiga koma enam puluh dua persen), sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas sebesar **62,76%** (enam puluh dua koma tujuh puluh enam persen) dan sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah sebesar **58,70%** (lima puluh delapan koma tujuh puluh persen).

Berdasarkan analisa tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program kegiatan secara umum sudah mendukung capaian misi renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

Sedangkan apabila dikaitkan dengan visi misi Walikota Banjarbaru yang ke empat yaitu “Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi kepada Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi”, maka program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru telah berkontribusi dengan maksimal yaitu Penambahan Titik CCTV, Pembuatan Command Center, Pengadaan Pusat Data dan Pemasangan Radio Link Sekolah di Kota Banjarbaru.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru juga telah membentuk dan membina KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) di 20 (dua puluh) Kelurahan di Kota Banjarbaru yaitu Kelurahan Palam, Kelurahan Loktabat Selatan, Kelurahan Loktabat Utara, Kelurahan Mentaos, Kelurahan Guntung Paikat, Kelurahan Syamsudin Noor, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kelurahan Cempaka, Kelurahan Guntung Payung, Kelurahan Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Tiung, Kelurahan Bangkal, Kelurahan Guntung Manggis, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kelurahan Komet, Kelurahan Sungai Besar dan Kelurahan Kemuning. Serta juga telah dibuat aplikasi Lapor, yaitu penyampaian SMS aduan dari masyarakat yang secara langsung akan ditanggapi oleh SKPD terkait.

Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila masih banyak terdapat kekurangan atas laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan kami lakukan menjadi lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru,



ASEP SAPUTRA, S.Kom, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19770909 200604 1 006